

## **SKRIPSI**

# **IMPLEMENTASI HAK ATAS KERAHASIAAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor : 146/Pid.sus-Anak/2015/PN Mks)**



**OLEH  
DYAH AMBARSARI  
B111 12 349**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KERAHASIAAN ANAK  
SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

**(Putusan Nomor : 146/Pid.sus-Anak/2015/PN Mks)**

**OLEH  
DYAH AMBARSARI  
B 111 12 349**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI HAK ATAS KERAHASIAAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL**

disusun dan diajukan oleh

**DYAH AMBARSARI**  
**B 111 12 349**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 2 Juni 2016  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Hj. haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**An. Dekan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SEMINAR SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Dyah Ambarsari  
NIM : B111 12 349  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Implementasi Hak Atas Kerahasiaan Anak Sebagai  
Pelaku Kekerasan Seksual

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar skripsi.

Makassar, Mei 2016

Pembimbing I



**Prof. Dr. Muhadar. S.H., M.S**  
**NIP. 195903171987031002**

Pembimbing II



**Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19661212 199103 2 002**

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **DYAH AMBARSARI**  
No. Pokok : B111 12 349  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Implementasi Hak Atas Kerahasiaan Anak Sebagai  
Pelaku Kekerasan Seksual

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003 

## ABSTRAK

**Dyah Ambarsari (B11112349), Implentasi Hak Atas Kerahasiaan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual(Putusan Nomor : 146/Pid.sus-Anak/2015/PN Mks), di bawah bimbingan Muhadar Selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pemenuhan hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di kota makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar dengan mengambil data untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan kendala apa yang menyebabkan implementasi pemenuhan hak tersebut. Selain itu, Penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu Kanit PPA Polrestabes Makassar, penyidik Polrestabes Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, ketua LBH APIK Makassar, serta orang tua Pelaku.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penulis, antara lain: (1) Sejauhmana Implementasi pemenuhan hak atas kerahasiaan anak ebagai pelaku kekerasan seksual dengan studi kasus satu putusan. (2) Kendala Apakah yang Menyebabkan Pelaksanaan pemenuhan hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual, adapun faktor-faktor yang menjadi kendala pemenuhan berasal dari luar penegak hukum dan tidak adanya sanksi yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada **Ayahanda Sumarno** dan **Ibunda Umiyatun** yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat dan dukungan yang begitu besar penulis, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga penulis dengan doa yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Orangtua yang sangat menyayangi penulis, walaupun penulis

begitu banyak dosa kepada keduanya. Terkhusus pula kepada saudara penulis satu-satunya di dunia ini **Adi Saputra**, penulis ucapkan terima kasih atas semua kasih sayang dan dukungannya. Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada **Bulek Suharni** dan **Paklek Hardo Suwarno Surip** serta **Ulfah Salma Rofifah** yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis. Serta menjadi keluarga kedua penulis semasa berada di perantauan. Penulis hanya mampu berkata terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan-Nya kepada mereka semua. Amin

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi Strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul:“**IMPLEMENTASI HAK ATAS KERAHASIAAN ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Perkara Nomor : 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks.)**”

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. **Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
7. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** dan **Dr. Haeranah, S.H.,M.H.** Selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas bimbingannya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah kalian berikan. Semoga ilmu yang kalian berikan dapat bermanfaat.
8. **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H, Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.M.H.,M.Si.** dan **Dr. Abdul Asis, S.H.,M.H,** terima kasih atas kesediannya menguji penulis, dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kalian harapkan.
9. **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.,** selaku Penasihat Akademik (PA). Terima kasih atas kebaikan serta kesediannya setiap kali penulis berkonsultasi kartu rencana studi (KRS).
10. **Bapak/Ibu Dosen** yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu **Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum**

## **Masyarakat dan Pembangunan, dan Hukum Internasional**

terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, kalian adalah Dosen yang selalu memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

11. Terima Kasih Kepada Pegawai atau Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya “melayani” segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir terselesaikan.

12. Terima Kasih Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi penulis.

13. Terima kasih kepada sahabat penulis dari kecil **Nur Alvy Fadliyah** dan **Herlina Ilyas**, yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

14. Terima Kasih kepada sahabat penulis para pencinta antek, **Irma Sari Ramadhani** dan **Nurul Fauziah Hambali, S.H** Terima Kasih atas kebersamaannya, bantuannya, kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan apapun. Tanpa kalian di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serasa rumah tanpa cahaya. Semoga kita dapat menggapai cita-cita dan semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan membawa berkah. Amiin.

15. Terima Kasih juga Kepada Sahabat-Sahabat Penulis lainnya :  
**Archita Diaz Anugrianti, Andi Esa Nastiti, Andi Dinda Ayu dinantii, Putri Radiyanti Harfin, Andi Reza pahlevi, Firman Nasrullah, Rio Atma Putra**, dan sahabat penulis yang tidak bisa penulis tulis semuanya, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan, bantuan serta warna pelangi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
16. Terima Kasih kepada keluarga besar **Germatik**, sebagai organisasi tempat penulis untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, keluarga, yang selalu memberikan kehangatan dan kebahagiaan bagi penulis.
17. Terima Kasih Kepada **Rekan Penulis di Komunitas EDUCARE**  
Karena mengajarkan penulis untuk berbagi ilmu dan terus berbagi dengan hati yang lapang.
18. **Teman-Teman Angkatan 2012 (PETITUM) FH-UH**, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. Tidak terasa kebersamaan kita di FH-UH telah berakhir. Sukses selalu untuk kita semua.
19. **Teman-Teman KKN Reguler Universitas Hasanuddin Gel. 90 desa Patalassang, kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep**, terkhusus untuk **Supervisor, Kanda Irwan Mulya Setiawan, Kanda James P. Titus, Kanda Makmun, My princerss Ririn Picarima, Desiani Rerung, dan Kanda Irfah Apriliani**, maupun

teman-teman lainnya yang tidak sempat disebutkan namanya. Terima kasih atas kerja samanya selama KKN. Begitu banyak pengalaman yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di Pangkep. Kebaikan, keramahan dan bantuan kalian tidak akan pernah terlupakan. Teruslah bersemangat Kawan-kawan.

**20. Terima Kasih kepada Saudara-saudaraku GALAXI1 IPA 1 SMA Negeri Majene**

21. Terima Kasih kepada para pahlawan tanpa tanda saja dalam hidupku, dimulai sejak sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas yang telah menjadi orangtua sekaligus pemberi ilmu dalam mencapai cita-cita dalam hidup saya.

22. Segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian begitu berarti.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima oleh semua orang yang membutuhkannya.

Makassar, Mei 2016

**Dyah Ambarsari**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Pengertian .....	6
1. Pengertian Tindak Pidana .....	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	8
B. Pidana dan Pemidanaan .....	11
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	13
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	15
1. Konsep Kekerasan dan Kejahatan Seksual .....	15
2. Kekerasan Seksual Menurut KUHP .....	16
3. Kekerasan Seksual Menurut UU No. 23 Tahun 2002.....	22

4. Kekerasan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 .....	23
D. Pengertian Anak .....	25
1. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum .....	25
2. Pengertian Anak Sebagai Korban Kejahatan .....	26
3. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	28
E. Perlindungan Anak.....	28
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	28
2. Tujuan Perlindungan Anak .....	28
3. Hak-Hak Anak .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Tipe Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D Teknik Penelitian.....	41
E. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran umum .....	43
B. Implementasi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual .....	47
C. Implementasi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di tingkat penyelidikan dan penyidikan (Polrestabes Makassar) .....	52
D. Implementasi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di tingkat pengadilan negeri (Pengadilan Negeri Makassar) .....	56
E. Perlindungan hak kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual oleh pihak terkait lainnya .....	60

F. Kendala dari implementasi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini yang masih berlaku adalah sistem hukum yang ada di negara Belanda. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya adalah kepentingan-kepentingan umum dan soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah memiliki wewenang dan sekaligus juga dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum pidana.

Seiring perkembangan zaman kejahatan semakin berkembang, korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak sehingga ada beberapa delik khusus yang diatur diluar KUHPidana, misalnya saja tentang perlindungan anak. Fenomena terjadinya kasus kekerasan pada anak mulai menjadi sorotan di Indonesia. Masalah kekerasan pada anak yang terjadi baik fisik maupun psikis memang sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan perlindungan anak seperti yang telah tercantum dalam Uu perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan ini meliputi perlindungan anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Dikarenakan pelaku tindak pidana(delik) di zaman ini bukan hanya orang yang sudah bisa menjadi subjek hukum, orang yang di bawah umur pun bisa menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, di dalam hukum pidana dikenal namanya peradilan anak. Yang di dalam prakteknya berfungsi sebagai tumpuan untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur saat anak sebagai pelaku namun juga Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur saat anak menjadi korban. yang mana dalam undang-undang perlindungan anak juga tercantum pasal yang melindungi hak-hak anak saat ia menjadi pelaku atau berhadapan dengan hukum. Undang-undang perlindungan anak mengalami perubahan yang diundangkan dalam Uu No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa pasal yang diubah, yang mana perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas undang-undang perlindungan anak.

Kebanyakan yang terjadi di masyarakat Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga

diatur dalam perlindungan anak. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Maraknya anak yang menjadi korban dari tindak pidana, misalnya saja korban kekerasan fisik, psikis, dan mental membuat pemerintah mengaturnya dalam satu undang-undang.

Sebagai contoh bentuk perlindungan tersebut, yaitu tercantumnya Pasal 17 ayat(2) UU No. 23 tahun 2002 yang mengatur hak anak yang menjadi korban atau pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual, maka harus dijaga kerahasiaannya. Dalam perubahan undang-undang perlindungan anak, tidak mengubah isi Pasal 17 ayat(2) yang mengatur masalah hak atas kerahasiaan anak saat menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual. Selain itu terdapat Pasal yang memperjelas masalah pentingnya kerahasiaan anak yaitu tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 huruf g sebagai berikut :

“perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa untuk menghindari labelisasi dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari terhadap anak, karena tidak jarang sebagian masyarakat beranggapan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai orang yang dikucilkan, dan labelisasi yang melekat pada diri si anak tersebut akan terus terbayang sampai anak tumbuh dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah mengenai, **“Implementasi Hak Atas Kerahasiaan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi hak atas kerahasiaan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual?
2. Apa yang menjadi kendala dari implementasi hak atas kerahasiaan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi dari penerapan hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang terdapat dalam UU perlindungan anak

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Praktis**

Memberi kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kepolisian dan jajaran penegak hukum.

### **b. Kegunaan Yuridis**

Memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan hak anak dan perlindungannya yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>1</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah sebagai berikut:

##### a. Menurut Pompe

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta, Grafindo, hal 69.

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>2</sup>

b. Menurut Utrecht

Menurut Utrecht, "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa pidana itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>3</sup>

c. Menurut Moeljatno

Sementara itu menurut moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang diciptakan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

d. Menurut Simons

Simons merumuskan "*strafbaar feit*" adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum."<sup>5</sup>

e. Menurut H.J. van Schravendijk

H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah "kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan kensyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang oleh karena itu dapat dipersalahkan."<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal.97-98.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 98.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 98.

<sup>5</sup> Adami Chazawi. op.cit. hal. 75.

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal.75



## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno, unsur tindak adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.<sup>7</sup>

### a. Unsur Subjektif

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *Culpa*)

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 79.

kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

**b. Unsur Objektif**

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP  
Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>8</sup>

**B. Pidana dan Pemidanaan**

**1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu : hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, hukuman pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 7.

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2005, *pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, kreasi wacana, Hal. 15.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat

untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

c. Teori gabungan (*vernegings theorien*). Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>10</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Menurut Maramis<sup>11</sup>, beberapa diantara pembedaan yang terpenting, yaitu:

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran. Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdriften*),

---

<sup>10</sup> Adami chazawi, op.cit. Hal. 157.

<sup>11</sup> Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, depok, Raja Grafindo Persada, Hal.69-82.

sedangkan buku III KUHPid memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

- b. Kejahatan dan kejahatan ringan. Dalam buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (Belanda : *lichte misdrijven*). Menurut **J.E. Jonkers**, kejahatan ringan berasal dari Hindia Belanda sendiri. Hukum pidana negeri Belanda tidak mengenal kejahatan ringan. Diadakanya jenis kejahatan ini karena pengadilan berada dalam jarak-jarak yang jauh, sehingga untuk bentuk-bentuk kejahatan yang lebih ringan dipandang perlu dibuat klasifikasi tersendiri agar dapat diadili oleh hakim sederhana. Dalam buku II (Kejahatan) ada sembilan macam kejahatan ringan, yaitu :
  - 1) Penganiayaan Hewan Ringan(Pasal 302 ayat (1) KUHP.
  - 2) Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)
  - 3) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP)
- c. Delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam Buku II KUHPid tentang Kejahatan.

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depaan umum (Pasal 504 KUHPid).
- d. Delik formal dan delik materil. Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*vooltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Jadi, delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*vooltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan. Contohnya Pasal 362 KUHPid tentang pencurian. Delik material atau delik dengan perumusan material adalah delik yang baru dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang.
- e. Delik aduan dan delik bukan aduan. Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan. Dalam KUHPid, aturan-aturan tentang delik aduan diatur dalam Buku I Bab VII (Mengajukan dan Menarik

Kembali pengaduan dalam kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan), yang mencakup Pasal 72s/d Pasal 75. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.

- f. Delik sengaja dan delik kealpaan. Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya Pasal 338 KUHPid yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHPid, yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- g. Delik selesai dan delik percobaan. Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHPid tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksud dengan percobaan (*poging*). Pada Pasal 53 ayat (1) KUHPid hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidanya percobaan melakukan kejahatan.
- h. Delik komisi dan delik omisi. Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.
- i. Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap yang tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang yang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah.

## **C. Tindak pidana kekerasan seksual**

### **1. Konsep kekerasan dan Kejahatan Seksual**

Kejahatan seksual hakikatnya adalah suatu tindak kejahatan berbasis gender yang mencederai martabat

kemanusiaan dan harga diri seseorang, sebagaimana diatur dalam butir 18 Deklarasi Vienna 25 juni 1993. Kejahatan seksual adalah kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakibat sama beratnya bagi orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi korbannya. Kejahatan seksual masuk ke dalam kategori kejahatan berat terhadap kemanusiaan karena kejahatan tersebut berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Secara fisik, kejahatan seksual dapat menyebabkan mulai dari luka ringan, luka berat, cacat permanen, bahkan kematian. Dari aspek psikologis, kejahatan seksual berdampak pada terganggunya ketenangan jiwa korban yang antara lain dapat terlihat dalam bentuk gejala sulit tidur, ketakutan apabila melihat orang dengan ciri-ciri tertentu yang mirip pelaku, sulit makan, gangguan buang air besar dan buang air kecil, histeria, gangguan makan, depresi, menurunnya kemampuan belajar, sampai pada gejala munculnya keinginan dan usaha untuk bunuh diri. Secara sosial, para korban kejahatan seksual juga akan mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya, terutama apabila lingkungannya, terutama apabila lingkungan memberi stigma negatif terhadap korban kejahatan seksual.

Pada ranah publik, kekerasan seksual dapat terjadi antara lain dalam bentuk pemerkosaan terhadap individu, pelecehan seksual di tempat kerja, pencabulan yang menimpa anak maupun



remaja di sekolah/universitas/ tempat le/ klub olahraga. Untuk pemerkosaan, dapat terjadi pula *mass rape* atau pemerkosaan yang dilakukan oleh banyak pelaku terhadap sejumlah korban dalam waktu bersamaan.<sup>12</sup>

## **2. Kekerasan Seksual menurut KUHP**

### **1) Pasal 285**

Produk hukum pertama yang dibahas adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya yang disingkat dengan KUHP). Dalam KUHP kejahatan yang menyangkut masalah seksualitas diatur secara khusus pada Bab XIV : kejahatan kesusilaan. Pasal dalam KUHP yang menyebutkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan seseorang untuk memaksa perempuan melakukan persetubuhan adalah 285.

#### **Pasal 285:**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Hal yang penting untuk diberi catatan dari pasal di atas adalah tindak pidana kekerasan seksual, tidak secara khusus disebut dalam pasal tersebut. Akan tetapi langsung diatur tentang pemerkosaan yang dikaitkan dengan

---

<sup>12</sup> Lidwina Inge Nurtjahyo, tanpa tahun, perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual, tanpa tempat, (Bunga Rampai) Hal. 383-384.

kekerasan dan ancaman kekerasan. Selanjutnya pemerkosaan dapat dikenakan apabila korban adalah perempuan di luar perkawinan, sedangkan perempuan di dalam perkawinan atau istri, tidak termasuk.

## **2) Pasal 286**

**Pasal 286** berbunyi:

barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam pasal ini diatur mengenai persetubuhan dengan perempuan yang terjadi di luar perkawinan, di mana perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Ada dua hal penting untuk dibahas dalam pasal ini. *Pertama*, mengenai konsep '*ketidakberdayaan*' tersebut. *Kedua*, mengenai pidana yang lebih ringan dalam pasal ini.

## **3) Pasal 287**

**Pasal 287** berbunyi:

**Ayat 1:** barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar dari perkawinan, padahal diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

**Ayat 2:** penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

#### 4) Pasal 288

Pasal 288 KUHP mensyaratkan adanya situasi khusus supaya perbuatan persetubuhan terhadap perempuan di bawah umur dapat dipidana.

##### **Pasal 288**

**Ayat 1:** *barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

**Ayat 2:** *jika perbuatan mengakitatnya luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.*

**Ayat 3:** *jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

#### 5) Pasal 289

Pasal 289 dalam KUHP secara khusus mengatur tentang pidana bagi pelaku perbuatan cabul. Pada pasal ini, perbuatan cabul dijelaskan sebagai 'perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan' tanpa dijelaskan batasan dari perbuatan cabul itu sendiri.

##### **Pasal 289:**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## 6) Pasal 290

Pasal 290 KUHP secara khusus mengatur mengenai pidana bagi pelaku perbuatan cabul dalam kondisi tertentu. *Pertama*, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan (ayat 1). *Kedua*, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Batasan di bawah umur dalam Pasal ini adalah orang yang belum berusia 15 tahun (ayat 2).

### Pasal 290

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diiduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diiduganya bahwa umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

## 7) Pasal 291

### Pasal 291

**Ayat 1:** jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

**Ayat 2:** jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## **8) Pasal 292**

### **Pasal 292**

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

## **9) Pasal 293**

### **Pasal 293**

**Ayat 1:** barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik dalam tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahuinya atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

**Ayat 2:** Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

**Ayat 3:** Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

## **10) Pasal 294**

### **Pasal 294**

**Ayat 1:** Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Ayat 2:** diancam dengan pidana yang sama :

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya,

atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.<sup>13</sup>

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar, penerima perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan ( Pasal 285 s/d Pasal 294 KUHP). Untuk kasus terkait pencabulan atau pemerkosaan. biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa *visum et repertum*.<sup>14</sup>

### **3. KekePrasan Seksual Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak mencantumkan pasal mengenai kekerasan seksual pada anak, sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 396-413

<sup>14</sup> Diana Kusumasari, 2011, *jerat hukum dan pembuktian pelecehan seksual*, melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 4 desember 2015, pk. 13.07 WITA.

## **Pasal 69**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2.) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

## **Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

**4. Kekerasan Seksual Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014  
tentang perubahan UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak.**

**Pasal 76D**

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**Pasal 76E**

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

**Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## **Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **D. Pengertian Anak**

### **1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Dalam **Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012** pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 16 menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, serta jaminan bahwa penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan hanya akan dilakukan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya ketentuan Pasal 17 undang-undang ini menjamin hak setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk : mendapat perlakuan yang manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang

dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam setiap tahapan upaya hukum; membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak dalam sidang tertutup; serta dirahasiakan (identitasnya).

Ketentuan Pasal 64 undang-undang ini juga secara lebih spesifik mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat. Di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui perlakuan yang manusiawi, penyediaan petugas pendamping, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terhadap perkembangan anak, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua/keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi.<sup>15</sup>

## **2. Pengertian Anak sebagai Korban Tindak Pidana**

Dalam **Pasal 1 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012** pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu : Anak yang belum berusia 18(delapan belas) tahun yang mengalami

---

<sup>15</sup> Marlina Widati Wulandar, tanpa tahun, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tanpa tempat, (Bunga Rampai) Hal. 463

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya.

Korban kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.

*Kedua*, ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat berupa: (a) *Primary Victimization*, adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok; (b) *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum; (c) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; (d) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku

sendiri, contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba; dan (e) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.<sup>16</sup>

### **3. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum**

Dalam **Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012** pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

## **E. Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Dalam **Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002**, dicantumkan pengertian mengenai perlindungan anak, sebagai berikut :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

---

<sup>16</sup> Haryanto Dwiatmodjo, 2010, *Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Banyumas*, melalui <http://www.pdfunlock.com/iframeupload?uuid=306d1896-7e50-4044-a71b-39ecd77ab128>, diakses pada tanggal 16 desember 2015, pkl. 12.25 WITA.

## 2. Tujuan Perlindungan Anak

Jika mengacu pada **UU No. 23 tahun 2002** tentang Perlindungan Anak, dalam **Pasal 3** tercantum tentang apa itu tujuan dari perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :

*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”*

## 3. Hak-Hak Anak

### a. Hak-hak anak menurut undang-undang no. 23 tahun 2002

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam BAB II, dimulai dari Pasal 4 s/d Pasal 18, mengatur mengenai masalah hak-hak anak. Adapun hak-hak yang dimaksud sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

**Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

**Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

**Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

**Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**Pasal 13**

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

**Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

**Pasal 15**

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. pelibatan dalam peperangan.

**Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai

dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

**Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

**b. Hak-hak anak menurut undang-undang no. 35 tahun 2014  
perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002**

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002, ada beberapa pasal yang diubah, berikut ini beberapa pasal mengenai hak anak yang diubah, sebagai berikut :

**Pasal 6**

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.



**Pasal 9**

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**Pasal 12**

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

**Pasal 15**

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual

**c. Hak-hak anak menurut undang-undang no. 11 tahun 2012  
tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA)**

Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga mengatur mengenai hak-hak anak. Berbeda dengan undang-undang perlindungan anak, undang-undang ini membagi menjadi dua bagian besar, yaitu hak anak selama proses peradilan anak dan hak anak selama masa pemidanaan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebagai berikut :

**Pasal 3**

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g.tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h.memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k.memperoleh advokasi sosial;
- l.memperoleh kehidupan pribadi;
- m.memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n.memperoleh pendidikan;
- o.memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **d. Perlindungan saksi dan korban menurut undang-undang**

**31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban**

Dalam suatu proses peradilan pidana saksi dan korban memegang peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materil. Sehingga sudah sedah keharusan

ketika saksi dan korban saat akan memberikan keterangan harus disertai dengan jaminan perlindungan. Pengertian saksi dan korban tercantum dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam **Pasal 1 ayat (1)** disebutkan pengertian dari saksi, sebagai berikut :

*“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”*

Sedang pengertian korban tercantum dalam **Pasal 1 ayat (3)** menjelaskan tentang pengertian korban, sebagai berikut:

*”Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”*

undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan jaminan yang dimaksud tersebut dengan adanya beberapa pasal yang tercantum dalam undang-undang ini, sebagai berikut :

## **Pasal 5**

### **(1) Saksi dan Korban berhak:**

- a.memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c.memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d.mendapat penerjemah;
- e.bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f.mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g.mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h.mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i.dirahasiakan identitasnya;
- j.mendapat identitas baru;
- k.mendapat tempat kediaman sementara;
- l.mendapat tempat kediaman baru;
- m.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n.mendapat nasihat hukum;
- o.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p.mendapat pendampingan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksidan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

#### **Pasal 6**

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan keputusan LPSK

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur

mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

#### **Pasal 7A**

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

#### **Pasal 7B**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian mengenai masalah yang saya akan jadikan objek, yaitu menggunakan tipe peneliitian atau sifat penelitian empirik atau *law in action*, dengan membandingkan dengan Normatif yang ada.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah:

1. Kantor Kepolisian Makassar.
2. Pengadilan Negeri Makassar.
3. Perpustakaan
4. Lembaga Bantuan Hukum APIK

Alasan penulis memilih tempat tersebut karena ketiga tempat ini sesuai untuk memenuhi data yang ingin saya kumpulkan mengenai perlindungan anak dalam berbagai aspek.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini terdiri dari 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Mengenai data primer yaitu dari, Kantor Polisi, dan Pengadilan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta



mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

#### **D. Teknik Penelitian**

Dalam penyusunan proposal ini, digunakan dua metode pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan data dari berbagai literatur seperti, Buku-Buku, perundang-undangan serta tulisan lainnya. Dalam melakukan penelitian lapangan ini menggunakan metode observasi yaitu melakukan peninjauan langsung di tiga lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait, guna memperoleh data sebagai bahan penelitian, metode yang ke dua adalah metode Interview (wawancara) melalui wawancara, penulis melakukan tanya jawab langsung terhadap responden untuk memperoleh informasi dan data yang akan menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

#### **E. Analisis Data**

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji dan membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini.

Hal-hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.429.242 jiwa<sup>17</sup> adalah salah satu contoh kota Metropolitan yang ada di Indonesia, dengan tingkat kejahatan dan penyimpangan yang tinggi. Bentuk kejahatan serta penyimpangan yang terjadi sudah dianggap sebagai hal yang biasa, salah satunya adalah penyimpangan yang bertentangan dengan nilai asusila, dalam hal ini adalah praktik kekerasan seksual.

Penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia melibatkan beberapa institusi baik institusi yang bergerak di bidang penegakan hukum atau perlindungannya. Proses penghukuman merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, sedangkan perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan baik yang bersifat hukum atau perlindungan yang tidak bersifat hukum. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak di Indonesia, bahkan yang melakukan kekerasan seksual sudah merambat ke anak. Pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian intensif dari pemerintah.

---

<sup>17</sup> "Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar 2014",  
[http://makassarkota.bps.go.id/websiteb/pdf\\_publicasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-Kota-Makassar-2015.pdf](http://makassarkota.bps.go.id/websiteb/pdf_publicasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-Kota-Makassar-2015.pdf), (Diakses tanggal 12 April pukul 13.34 WITA)

Di dalam undang-undang perlindungan anak, masalah kekerasan seksual pada anak, baik anak yang menjadi korbannya atau anak yang menjadi pelakunya mendapat perlindungan. Dalam hal ketika anak menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual maka ia wajib mendapatkan hak kerahasiaan identitasnya seperti yang tercantum dalam pasal 17 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada korban kekerasan seksual, namun juga kepada pelaku kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai korban, maupun pelaku, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 butir (i) yang berbunyi, "Penghindaran dari publikasi atas identitasnya". Sehingga ketika hal di atas tidak mendapat perlindungan, maka labelisasi akan menghantui anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual. Adapun yang dimaksud

dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak pelaku kekerasan seksual, misalnya si A adalah anak pelaku perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu pelaku kekerasan seksual, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai seorang yang dalam tanada kutip cabul, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Tahun 2014- 2015

NO.	TINDAK PIDANA	2014 s/d. 2015
1.	Meninggalkan Rumah	15 kasus
2.	Pengeroyokan	9 kasus
3.	Pencurian	2 kasus
4.	Membawa lari anak	8 kasus
5.	Menghamili Tidak Bertanggung jawab	2 kasus
6.	Persetubuhan Anak	5 kasus
7.	Membawa senjata tajam	2 kasus
8.	Perbuatan tak menyenangkan	1 kasus

9.	Penganiayaan Anak	18 kasus
10.	Pemeriksaan	1 kasus
11.	Pencabulan	2 kasus
12.	Asusila	1 kasus
13.	Sodomi	3 kasus
TOTAL KASUS		66 kasus

*Sumber : Polrestabes, 13 April 2016*

Berdasarkan tabel di atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2014-2015 sebanyak 66 kasus dan terbagi dalam 13 jenis tindak pidana. Data di atas menunjukkan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan data yang signifikan walaupun tidak mencapai angka 100. Memang perlu pencegahan khusus, agar jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana bisa menurun. Kenakalan yang dilakukan oleh anak di kota Makassar bukan lagi kenakalan biasa, namun sudah termasuk dalam kategori kejahatan.

#### **B. Implementasi hak atas kerahasiaan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 j.o undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang

pelindungan anak. Dalam undang-undang perlindungan anak diatur berbagai macam hak anak yang dilindungi, salah satunya yaitu hak untuk dirahasiakan identitasnya saat anak menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya.

Anak yang menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual perlu mendapat perhatian khusus. Alasan logikanya adalah anak yang harusnya belum mengenal mengenai apa itu yang dimaksud dengan seksualitas, namun dapat melakukan kekerasan seksual. Dan juga anak yang seharusnya dapat menikmati masa-masa yang ceria harus terenggut karena menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang kompleks. *Pertama*, kekerasan seksual dalam paradigma masyarakat merupakan perbuatan yang kotor, sehingga yang melakukan ataupun yang menjadi korban akan mendapat dampak sosial yang sangat dalam. *Kedua*, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat merusak masa depan karena bukan hanya fisik namun juga merusak psikis, terutama bagi anak, baik yang menjadi pelaku atau korban. Sehingga anak perlu mendapat perlindungan, seperti yang tercantum dalam pasal 15 butir (f) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

undang-undang nomor 23 tahun 2002, “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”

Perlindungan anak tersebut dapat tercapai ketika semua pihak dapat bekerja sama dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud tersebut, yaitu : aparat penegak hukum (meliputi : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat hukum lainnya), orang tua/ wali, serta masyarakat (melalui kegiatan peran masyarakat dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak).

#### **1. Posisi kasus**

Kasus ini melibatkan Muhajirin alias Aji (16 tahun). Kasus ini bermula pada hari selasa, tanggal 02 juni 2015 pada pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan maccini pasar malam IV makassar. Pada waktu tersebut saksi Azura Safwana Rubina Alias Azura (korban yang berumur 5 tahun) sedang bermain di rumah terdakwa bersama saksi Nurqalam Alfira Syam alias Alfira dan Siti (adik terdakwa), ketiganya memutuskan untuk pulang, tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban. setelah itu terdakwa membawa korban ke kamar mandi dan mencium kedua pipi korban. lalu terdakwa mengancam korban dan membuka celana milik korban dan memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam kemaluan korban. Di mana sebelumnya



terdakwa juga telah melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali sehingga korban mengalami rasa sakit dan trauma. Hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari rumah sakit bayangkara.

## **2. Dakwaan Penuntut umum**

Surat dakwaan dalam perkara tersebut disusun oleh penuntut umum secara alternatif. Adapun surat dakwaan penuntut umum kepada terdakwa Muhajirin tertanggal 19 juni 2015 dengan nomor register perkara : Nomor 146/Pid-sus/2015/PN Mks adalah sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Muhajirin alias aji pada hari selasa, tanggal 02 juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan maccini pasar malam IV Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Makassar, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Uu no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Uu No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Muhajirin alias aji, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dalam dakwaan pertama, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Uu No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Uu No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## **ATAU**

### **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa Muhajir alias Aji, pada waktu dan tempat seperti tersebut di dalam dakwaan pertama dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Uu No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Uu No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

Tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Muhajirin alias Aji pada pokoknya menuntut agar majelis hakim mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa Muhajirin alias Aji, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Uu RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Uu No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhajirin alias Aji, dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selamnya berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

#### **4. Amar Putusan**

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak atas terdakwa Muhajirin alias Aji dalam amar putusannya dalam putusan Nomor 146/Pid.sus-anak/2015/PN mks menyatakan :

1. Menyatakan anak Muhajirin alias Aji terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA” dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

## **5. Upaya Diversi**

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah : “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. Setiap tahap pemeriksaan akan diupayakan proses diversi, sehingga ketika di tingkat kepolisian gagal menempuh upaya diversi, kemudian dilanjutkan lagi di tingkat kejaksaan. Ketika di tingkat kejaksaan juga mengalami kegagalan, upaya diversi yang terakhir akan dilaksanakan di tingkat pengadilan.

Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

pidana. Dalam kasus yang menjadi studi penulis, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Muhajirin yang dituntut 7 (tujuh) tahun penjara oleh penuntut umum, juga tetap dilakukan upaya diversi. Mulai dari di tingkat kepolisian sampai pengadilan. Namun, upaya diversi yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut di atas, tidak berhasil. Seperti yang terlampir dalam berita acara diversi yang tertera dalam putusan, orang tua korban tidak menghendaki untuk dilaksanakannya diversi yang difasilitasi oleh hakim IG Eko Purwanto, S.H.,M.hum sebagai hakim tunggal dalam persidangan kasus tersebut.

Seperti yang terlampir dalam berita acara diversi, bahwa musyawarah diversi dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh fasilitator diversi. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kerahasiaan anak sangat diutamakan dalam semua proses pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum.

### **C. Implementasi Hak Atas Kerahasiaan Identitas Anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada Tingkat penyelidikan dan penyidikan(Polrestabes Makassar)**

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Di zaman sekarang tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun dalam

prakteknya terdapat anak yang menjadi pelaku tindak pidana, contohnya anak yang melakukan kekerasan seksual. Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Dua proses yang ditempuh pada setiap penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan. Kedua proses tersebut merupakan bagian dari wewenang kepolisian yang selama ini menjadi awal dari proses peradilan pidana. berikut ini merupakan tabel data tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2014-2015, sebagai berikut.:

NO.	TINDAK PIDANA	2014 s/d. 2015
<b>KEKERASAN SEKSUAL</b>		
1.	Persetubuhan Anak	5 kasus
2.	Pemeriksaan	1 kasus
3.	Pencabulan	2 kasus
4.	Asusila	1 kasus
5.	Sodomi	3 kasus
TOTAL KASUS :		12 kasus

*Sumber : Polrestabes, 13 April 2016*

Berdasarkan data di atas, walaupun terlihat jumlah kasus yang terdapat di polrestabes makassar tidak begitu

signifikan, karena hanya menunjukkan angka 12 kasus. Namun hal ini cukup membuat perhatian kepolisian melirik, dikarenakan masalah pelaku yang masih tergolong anak.

Tindak Pidana kekerasan Seksual yang dilakukan oleh anak merupakan objek penelitian penulis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh anak sebagai pelaku (Muhajirin) dan Korban (Azzuhra). Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, telah diketahui telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini didasari oleh adanya laporan dari keluarga korban. Berdasarkan laporan tersebut polisi kemudian menangkap tersangka Muhajirin. Dalam proses penyidikan, pelaku didampingi oleh ibu kandungnya (Satria). Pada Tahap pemeriksaan oleh penyidik, Muhajirin ditempatkan di ruang yang tertutup berbeda dengan bila tersangkanya adalah orang dewasa dan didampingi oleh wali korban.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada salah satu penyidik di unit Pidana Perlindungan Anak (PPA) yaitu dengan Bripda. Vivi Novalia<sup>18</sup> dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penanganan bagi pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Ini dibuktikan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bripda. Vivi Novalia pada tanggal 13 april 2016 jabatan sebagai penyidik



dengan pemisahan ruangan saat dilakukan pemeriksaan, terutama bagi pekaku kekerasan seksual. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak harus di tempat yang tertutup dan bebas dari keramaian. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan psikis terhadap jiwa si anak. Dalam kasus di atas dengan tersangka Muhajirin, pihak kepolisian juga tetap melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Kemudian, jika berbicara masalah kerahasiaan identitas anak, bribda vivi juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian sangat menjaga kerahasiaan identitas anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

Keterangan ini, diperkuat lagi dengan berdasarkan wawancara dengan kepala unit PPA Polrestabes Makassar Iptu. Ginandra Putri Sinastiti, S.IK<sup>19</sup>, yang mengungkapkan bahwa semua prosedur mulai pemeriksaan hingga berkas dilimpahkan ke kejaksaan, sangat menjaga anak untuk menghindari dari beban psikis dan moral. Setiap ada kasus yang masuk kepolisian selalu diupayakan untuk kerahasiaan identitas pelaku terutama pelaku kekerasan seksual yang masih di bawah umur. Menurut keterangan Kepala Unit PPA polrestabes Makassar tersebut, bahwa terkadang wartawan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Iptu. Ginandra Putri Sinastiti, S.IK pada tanggal 13 April 2016 sebagai kepala unit PPA Polrestabes Makassar

sendirilah yang mencari tahu sehingga mereka dapat mendapat informasi sendiri. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka pihak kepolisian hanya akan transparan mengenai prosesnya dan identitas tersangka diinisialkan.

Setiap perkara yang melibatkan anak, oleh kepolisian diupayakan untuk menjaga kerahasiaan identitas dari pelaku maupun korban kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan perintah undang-undang perlindungan anak dan juga merupakan alasan yang bernilai moral. Dalam hal alasan yang bernilai moral, kepolisian ingin menjaga kondisi psikis dari anak agar tidak mendapat sanksi sosial yang berat dari masyarakat. Dan jikaalaupun identitasnya sudah tersebar luas, kepolisian akan tetap menjaga kerahasiaan identitas.

#### **D. Implementasi Hak Atas Kerahasiaan Identitas Anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada tingkat pengadilan negeri (Pengadilan Negeri Makassar)**

Pada Tahapan ini penulis ingin meneliti konsep kerahasiaan identitas anak di pengadilan. Pengadilan merupakan puncak proses peradilan yang melahirkan putusan atas perkara tindak pidana dijatuhkan, yaitu berupa vonis. Berdasarkan penelitian penulis, di pengadilan ketika anak menjadi pelaku suatu tindak pidana diperlakukan khusus. Pertama, hakim yang digunakan hanyalah hakim tunggal.

Kedua, pakaian yang digunakan oleh hakim diharuskan untuk tidak menyerupai hakim. Ketiga, persidangan dilakukan dengan tertutup, demi menjaga kondisi psikologis anak dan kerahasiaan identitas anak.

Terutama ketika persidangan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Demi menjaga kerahasiaan identitas anak, pengadilan melakukan sidang tertutup agar tidak ada satu orangpun tahu, terutama dihindarkan media massa. Pengadilan sangat menjaga kerahasiaan identitas anak saat ia menjadi pelaku dari suatu tindak pidana, terutama kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian penulis, pengadilan berupaya untuk menjaga kerahasiaan anak ketika ia menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam kasus Muhajirin, proses persidangan juga dilakukan sesuai perintah undang-undang, yaitu tertutup demi menjaga kerahasiaan anak sebagai pelaku dan hakim yang mengadili juga hakim tunggal yaitu bapak IG. Eko Purwanto, S.H.,M.Hum.

Berdasarkan wawancara dengan hakim IG. Eko Purwanto, S.H.,M.Hum<sup>20</sup> yang membenarkan bahwa ketika persidangan dengan tersangka anak, hakimnya adalah hakim

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan IG. Eko Purwanto S.H.,M.Hum pada tanggal 21 April 2016 sebagai hakim pengadilan Makassar

tunggal dan persidangannya tertutup oleh umum. Dalam masalah kerahasiaan identitas anak sebagai pelaku narasumber juga membenarkan bahwa dalam peraturannya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana berdasarkan amanat undang-undang harus dirahasiakan identitasnya. Namun, narasumber menambahkan bahwa kerahasiaan identitas itu tidak berlaku saat persidangan. Karena pada saat persidangan hakim tetap menyebutkan identitas pelaku anak tersebut.

Pada intinya, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana dan berada pada tahap persidangan, pengadilan sebagai lembaga yang berwenang, sangat menjaga kerahasiaan identitas pelaku, baik itu orang dewasa atau bahkan terlebih lagi pelaku anak. Hal ini sekali lagi memiliki satu tujuan yaitu menjaga psikologi anak dan menjauhkan anak dari sanksi sosial yang lebih kejam dibanding pembedaan.

#### **E. Perlindungan Hak kerahasiaan Identitas Anak sebagai pelaku kekerasan seksual oleh Pihak Yang Terkait Lainnya**

Seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 j.o undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 59 ayat (1), bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dalam melakukan upaya perlindungan khusus bagi anak. Diterangkan lagi dalam ayat (2)

poin B yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian perlindungan khusus tersebut lebih diperjelas pada pasal 64, salah satu poinnya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapat penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Di luar dari pemerintah, masih terdapat pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak. Mulai dari orang tua, lembaga bantuan hukum atau lembaga perlindungan lainnya, serta masyarakat. Akan penulis uraikan pihak-pihak yang terkasit dalam upaya perlindungan anak, terutama masalah kerahasiaan identitasnya seperti di bawah ini :

**a. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Makassar**

Konsep Lembaga bantuan Hukum yaitu sebagai payung bagi pelayanan dalam memberikan bantuan hukum secara gratis bagi korban ketidakadilan, membela tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, dan keyakinan politik. APIK merupakan lembaga bantuan hukum yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, termasuk APIK Makassar. APIK berinduk di kota Jakarta, dan APIK Makassar didirikan bagi masyarakat kota Makassar yang membutuhkan keadilan. APIK Makassar didirikan sejak

tahun 2002 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 12 Perumahan Budi Daya permai Blok C No. 12 Makassar. LBH APIK adalah lembaga bantuan hukum yang mendampingi Muhajirin pada waktu itu.

Berdasarkan Wawancara dengan Ketua LBH APIK Rosmiati Sain, S.H<sup>21</sup> diperoleh keterangan bahwa dalam hal ketika LBH APIK menangani sebuah perkara, LBH APIK sangat menjaga kerahasiaan kliennya. Terutama ketika LBH APIK mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, pihak LBH sangat menjaga kerahasiaan kliennya. Sekali lagi dengan alasan yang sama yaitu untuk menjaga psikologis dari anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kasus Muhajirin, pihak LBH juga sangat menjaga kerahasiaan identitasnya, baik diminta ataupun tidak diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Ketika berbicara masalah upaya dari pihak LBH ketika kerahasiaan itu terbuka di muka umum, ketua LBH APIK menjelaskan bahwa ketika itu terjadi kami akan melakukan penuntutan dan ganti rugi berdasarkan Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Rosmiati Sain S.H pada tanggal 28 April 2016 sebagai Ketua LBH APIK Makassar

materil kepada yang membuka kerahasiaan tersebut. Namun, narasumber menambahkan bahwa sampai saat ini belum pernah ada kejadian dimana LBH APIK mengambil upaya tersebut. Dikarenakan belum pernah ada kasus yang ditangani oleh LBH APIK yang terbuka dan diketahui oleh orang banyak, termasuk kasus yang dialami oleh Muhajirin yang dimana hak kerahasiaannya masih tetap terjaga.

**b. Orang tua atau Wali dari Anak yang berhadapan dengan Hukum**

ketika kita berbicara masalah orang tua, maka yang terbesit dalam kepala penulis adalah guru yang paling mulia dalam kehidupan. Orang tua adalah pihak terpenting dalam hal masalah tumbuh kembang anak dan perlindungannya. Penulis telah mencoba untuk menemui salah satu orang tua yang anaknya sedang berhadapan dengan hukum. Narasumber saya adalah bapak Baharuddin dan Ibu Satria. Keduanya adalah orang tua dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Penulis mencoba untuk mengetahui bagaimana hak kerahasiaan anak menurut orang tua.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa orang tua pelaku (Muhajirin) tidak paham apalagi mengetahui tentang adanya hak

kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang tercantum dalam pasal 17 undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Baharuddin<sup>22</sup> ia mengungkapkan bahwa semua tetangga di sekitar kediamannya sudah mengetahui duduk peristiwa yang dialami Muhajirin anaknya. Karena pada saat upaya penangkapan oleh pihak kepolisian banyak yang menyaksikan, sehingga secara otomatis seluruh tetangganya mengetahui tentang apa yang menimpa anaknya. Narasumber menambahkan, walaupun mereka mengetahui, namun mereka tidak pernah melakukan upaya menjatuhkan mental anaknya.

Kemudian penulis mempertanyakan bagaimana perlakuan dari penegak hukum terhadap anaknya. Berdasarkan wawancara dengan ibu pelaku Satria<sup>23</sup> yang membenarkan bahwa ia yang mendampingi anaknya mulai dari penyidikan sampai keluarnya putusan pengadilan. Narasumber juga membenarkan bahwa pada saat anaknya diperiksa oleh penyidik di Polrestabes Makassar, anaknya ditempatkan di ruang tersendiri dan didampingi oleh

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Baharuddin pada 28 April 2016 sebagai orang tua pelaku kekerasan seksual anak

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Satria pada 28 April 2016 sebagai orang tua pelaku kekerasan seksual anak



narasumber. Ini menunjukkan upaya dari Polrestabes dalam hal penyidikan dan penyelidikan sudah sesuai prosedur.

**F. kendala dari implementasi hak atas kerahasiaan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual**

Di zaman sekarang ini, tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga merambat ke anak. Anak yang harusnya menikmati masa menyenangkan, namun harus terhalang tembok jeruji besi akibat tindakannya yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan ketertiban umum, dalam hal ini melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual berbeda dengan tindak pidana lainnya, walaupun esensinya tetap sama yaitu perbuatan yang harus dihukum.

Dalam Pasal 17 undang-undang nomor 35 tahun 2014 j.o undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur mengenai hak anak atas kerahasiaan identitas saat anak menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual. Diperkuat lagi dengan tercantumnya pasal 64 poin (i) undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan hukum atas : penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Dalam hal ini tujuan dari perlindungan atas kerahasiaan identitas tersebut adalah agar anak dapat terjaga kondisi psikis dan

terhindar dari sanksi sosial masyarakat umum. Perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas ini diharuskan pada setiap tahapan pemeriksaan sampai putusan.

Pada pembahasan kali ini, penulis melakukan penelitian mengenai kendala apa saja yang menghambat implementasi dari hak anak tersebut. Jadi, faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kendala dari implementasi hak atas kerahasiaan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala Unit PPA Polrestabes Iptu Ginandra Putri Sinastiti S.IK<sup>24</sup> Makassar, diperoleh keterangan bahwa dalam hal kendala untuk merahasiakan identitas kendalanya berasal dari eksternal polrestabes. Karena pihak polrestabes, khususnya bagian unit PPA sangat mengedepankan kerahasiaan anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada perintah undang-undang dan juga yang paling utama adalah alasan moral. Di mana pelaku masih dikategorikan sebagai anak, sehingga memiliki beban psikologi tersendiri. Hal ini diperkuat oleh wawancara saya dengan satu penyidik yang memohon untuk tidak dicantumkan namanya, bahwa kerahasiaan identitas anak itu sangatlah penting, kemudian menurutnya dapat mengganggu psikologi anak. Karena pernah terdapat kasus,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Iptu. Ginandra Putri Sinastiti, S.IK pada tanggal 13 April 2016 sebagai kepala unit PPA Polrestabes Makassar

dimana anak bunuh diri setelah identitasnya tersebar di khalayak ramai.

Upaya pihak penegak hukum juga sudah menunjukkan peningkatan dalam hal menjaga kerahasiaan identitas anak. Seperti di Polrestabes Makassar, berdasarkan penelitian penulis, perbandingan penanganan pelaku anak dan orang dewasa dilakukan dengan prosedur yang berbeda. Misalnya saja penggunaan ruangan yang tertutup ketika anak menjadi pelaku tindak pidana dan terkhusus kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis penulis sendiri, penulis berpendapat bahwa untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, diperlukan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat umum. Dikarenakan, walaupun penegak hukum sudah menjalankan perintah undang-undang yaitu menjaga kerahasiaan identitas anak, namun bila masyarakat dan pihak keluarga tidak tercipta kerja sama itu juga dapat dikategorikan sebagai kendala.

Berdasarkan wawancara dengan hakim IG Eko Purwanto, S.H.,M.hum, narasumber berpendapat bahwa dari pihak penegak hukum sejauh ini dapat menjalankan perintah undang-undang perlindungan anak untuk menjaga kerahasiaan, namun masih ada faktor eksternal seperti masyarakat dalam hal ini tetangga atau bahkan pegawai yang tidak sengaja mengetahui dan membuka kerahasiaan identitas pelaku. Dan masyarakat sulit untuk dikontrol

terlebih lagi banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan paham akan adanya hak anak ini. Hal inilah yang juga menjadi kendala untuk terpenuhinya hak atas kerahasiaan anak tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan orang tua pelaku, penulis menarik satu kesimpulan mengenai kendala terpenuhinya hak atas kerahasiaan anak adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak ini, sehingga tidak semua masyarakat tahu, dalam hal ini orang tua mengenai masalah hak anak tersebut. Kemudian, dalam kasus Muhajirin, prosedur penangkapan terhadap Muhajirin dilakukan secara terbuka oleh pihak kepolisian, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kediaman Muhajirin dapat mengetahuinya. Dan pada akhirnya, mengenai kekerasan seksual yang pada waktu itu, diduga dilakukan oleh Muhajirin terbuka kerahasiaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, penulis menarik kesimpulan atas permasalahan tersebut, maka penulis menyimpulkan :

1. Implementasi pelaksanaan hak anak atas kerahasiaan sebagai pelaku kekerasan seksual di kota Makassar tidak terpenuhi secara optimal. Walaupun penegak hukum dan instansi terkait sudah menjalankan kewajiban sesuai perintah undang-undang. Pada tahap penyidikan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sudah sesuai prosedur yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahap putusan pengadilan pun, pihak pengadilan juga sudah berupaya untuk menjaga dan memenuhi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Dalam hal anak sebagai pelaku, maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum, dan jika anak tersebut tidak mampu membayar seorang penegak hukum anak dapat meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum(LBH), dan dalam hal ini pihak LBH juga sudah menunjukkan usaha untuk menjaga dan memenuhi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Dalam hal menjaga hak atas

kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual, bukan hanya tugas dan kewajiban oleh para penegak hukum dan instansi terkait, namun juga merupakan kewajiban dari keluarga dan masyarakat. Namun, implementasi dari keluarga dan masyarakat seperti ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kedua pihak ini belum sepenuhnya memenuhi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Terakhir, penulis menarik kesimpulan bahwa undang-undang perlindungan anak hanya mengatur mengenai kewajiban menjaga hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual, namun tidak mencantumkan sanksi bagi yang tidak memenuhi hak tersebut. Namun, bagi yang ingin melaporkan dan menuntut ganti rugi pada prakteknya menggunakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, sebab di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai larangan membuka kerahasiaan, dalam hal ini kerahasiaan atas identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual

2. Kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di kota Makassar yaitu lebih ke faktor dari luar penegak hukum dan instansi terkait. Melainkan dari pihak lain yang juga mempunyai kewajiban memenuhi hak tersebut yaitu keluarga dan masyarakat. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan

hukum, dalam hal ini masalah hak atas kerahasiaan anak. Kemudian, hal tersebut juga disebabkan karena tidak tercantumnya dalam undang-undang perlindungan anak mengenai sanksi ketika hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual tidak terpenuhi, melainkan undang-undang hanya memerintahkan dan mewajibkan pemenuhan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar implementasi dari hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual berjalan dengan seharusnya, antara lain :

1. Pihak yang terkait perlindungan anak harus lebih aktif dalam hal sosialisasi mengenai kewajiban menjaga dan memenuhi hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual, sehingga pihak lain yang juga memiliki kewajiban pemenuhan hak tersebut dapat mengetahui dan memahami tentang adanya hak tersebut dalam undang-undang perlindungan anak.
2. Pemberian sanksi, yang berupa sanksi pidana akan lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan pihak yang memiliki kewajiban pemenuhan hak atas kerahasiaan anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Sehingga implementasi dari hak tersebut dapat tercapai secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Grafindo: Jakarta.
- Effendi Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Lidwina Inge Nurtjahyo. Tanpa Tahun. *Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Tanpa Tempat, (Bunga Rampai).
- Marlina Widati Wulandar. Tanpa Tahun. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Tanpa Tempat. (Bunga Rampai) Hal. 463
- Mohammad Taufik Makarao. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.

### Internet:

- Diana Kusumasari. 2011. *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*. Melalui <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>. Diakses pada tanggal 4 desember 2015. Pkl. 13.07 WITA.
- Haryanto Dwiatmodjo. 2010. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*. Melalui <http://www.pdfunlock.com/iframeupload?uuid=306d1896-7e50-4044-a71b-39ecd77ab128>. Diakses pada tanggal 16 desember 2015. Pkl. 12.25 WITA.